

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Publikasi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xi
Abstrak	xviii
Daftar Isi	xxii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	26
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan Penelitian	30
D. Manfaat Penelitian	30
E. Penegasan Istilah	30
F. Sistematika Pembahasan	36

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Keadaan Bahaya (State Of Emergency) di Indonesia	37
--	----

B. Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) di Indonesia	39
C. Tahapan pembentukan Perppu	40
D. Peraturan pembentukan perundang-undangan menurut UU nomor 12 Tahun 2011	40
E. Pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perppu.....	41
F. Hukum Islam	42
G. Fiqh siyasah Dusturiyah.....	43
H. Penelitian terdahulu.....	48

BAB III PAPARAN DATA

A. Analisis pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.	
1. Berdasarkan tinjauan Hukum Positif.....	51
B. Relevansi UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.	
1. Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959.....	54

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam tentang pembentukan UU Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.	
1. Berdasarkan tinjauan Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam dalam Hak Asasi Manusia didalam UU	

Nomor 52 Tahun 1960 Prp Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan

C. bahaya..... 69

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76